

JUDUL : TANGGUNG JAWAB PENGELOLA ATAS  
FASILITAS RUMAH SUSUN UMUM BAGI  
MBR YANG DIHUNI OLEH NON-MBR

Nama: Jerisa Frabel Tanta

NRP:120119075

Jurusan/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Pembimbing :

Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.

Erly Aristo S.H., M.Kn.

#### ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap bagaimana tanggung jawab pengelola atas fasilitas rumah susun umum yang seharusnya dikhususkan kepada MBR namun dihuni oleh non-MBR. Dalam penelitian ini, tinjauan yuridis yang dilakukan akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini menganalisa kasus di Kota Surabaya dimana terdapat rumah susun umum (rusunawa) yang seharusnya diperuntukan dan digunakan bagi para MBR justru dihuni oleh golongan yang non-MBR. Dalam hal ini terjadi sebuah kelalaian dari pihak pengelola rumah susun tersebut sehingga merugikan MBR itu sendiri karena tidak bisa mendapatkan hak huni atas rumah susun umum tersebut mengingat sebanyak 11.000 MBR Surabaya masih mengantri untuk mendapatkan fasilitas rusunawa di Kota Surabaya. Lebih lanjut, kejadian ini dapat mengarah pada *onrechmatige overheidsdaad* oleh Pemerintah Kota Surabaya khususnya DPRKPP.

Kata Kunci : Rusunawa, PUPR, DPRKPP

#### ABSTRACT

*This thesis discusses about juridical analysis of how's the responsibilities for public flats facilities that should be devoted to MBR but mostly occupied by non-MBR. In this research, the juridical review conducted will refer to Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 concerning Flats. This study analyzes cases in the city of Surabaya where there are public flats (rusunawa) that are supposed to be intended and used for low-income people but are actually inhabited by non-MBR groups. In this case, there was a negligence on the part of the manager of the flats which harmed the MBR itself because they were unable to obtain occupancy rights for the public flats, considering that as many as 11,000 MBR in Surabaya were still queuing to get the flats facilities in the city of Surabaya. Furthermore, this incident could lead to *onrechmatige overheidsdaad* by the Surabaya City Government, especially the DPRKPP.*

*Keywords: Rusunawa, PUPR, DPRKPP*